

Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal di Malaysia Melalui *Multi Track Diplomacy* Periode 2011-2016

Regina Rethanovagi¹

Rusdiyanta²

Abstract

The objective of this research is to analyze the completion of Malaysia's illegal Indonesian migrant labour problem through multi track diplomacy method. The researcher applies paradigm of liberalism approach which shows that government is not only the actor of international relationship. The periodization of this research is limited between 2014 until 2016. Periodization limit is applied because the problem of illegal Indonesian migrant labour has kept increasing since 2014. This research is a qualitative research, using state centric theory, international political concept, National interest theory, and diplomacy and multi-track diplomacy concept. The result of this research indicates that the solutions to handle the illegal labour is through multi-track diplomacy method by involving state actors and non-governmental organization to apply diplomacy effort to the Malaysia's government through preventing and overcoming program.

Keywords: *illegal Indonesian migrant labour, Malaysia, multi track diplomacy.*

Pendahuluan

Permasalahan pengangguran, rendahnya upah kerja dan kemiskinan merupakan faktor-faktor dari dalam negeri yang mendorong masyarakat Indonesia melakukan migrasi keluar negeri tujuannya adalah untuk mencari pekerjaan (Maruja M.B Asis, 2004). Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Indonesia berusaha untuk membuka jalur untuk masyarakat Indonesia agar dapat bekerja di luar negeri. Malaysia menjadi salah satu negara tujuan utama TKI karna memiliki kesamaan etnik, budaya dan bahasa dengan Indonesia. Namun, proses migrasi resmi melalui pemerintah membutuhkan waktu yang lama, biaya serta proses yang rumit hal ini menjadi faktor munculnya TKI ilegal.

TKI ilegal dapat diibedakan menjadi 3 kelompok yaitu sebagai berikut, 1) mereka yang datang ke suatu negara secara sembunyi-sembunyi tanpa membawa dokumen-

¹ Mahasiswi S1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur, Email:regina.retha@yahoo.com

² Dosen Tetap Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.

dokumen resmi, 2) Mereka yang menyalahi batas izin tinggal (overstay) yang ditandai dengan visa habis masa berlakunya, 3) mereka yang menyalahgunakan kontrak pekerjaan (Azizah Kassim, 2003). Oleh sebab itu pemerintah Malaysia berupaya untuk menangani permasalahan TKI ilegal melalui metode deportasi atau pemulangan massal. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) TKI bermasalah yang di deportasi oleh Malaysia terdapat sebanyak 20.000 setiap tahunnya (kemenkumham, 2016). Indonesia dan Malaysia melakukan kerjasama untuk menangani permasalahan TKI ilegal.

Hubungan Indonesia dan Malaysia terjalin dibidang ketenagakerjaan dimana Malaysia telah lama bergantung dengan buruh asing dari Indonesia. Permasalahan TKI di Malaysia telah menjadi masalah kedua negara. Upaya penyelesaian permasalahan dan perlindungan terhadap TKI yang tersebut dilakukan dengan menggunakan metode multi track diplomacy dimainkan oleh berbagai aktor yaitu pemerintah dan LSM International Organization for Migration (IOM). Dalam Undang- Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri pasal 1 no 4: "Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja".

Isu mengenai TKI ilegal di Malaysia menjadi masalah utama Indonesia dan Malaysia yang hingga saat ini belum terselesaikan. Beberapa dari TKI yang bermasalah juga rentan mengalami eksploitasi dan menjadi korban human trafficking. Sehingga Indonesia wajib untuk melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada. upaya multi track diplomacy diplomasi Indonesia dan Malaysia serta peran dari International Organization for Migration (IOM) untuk membantu mengatasi dan melindungi TKI bermasalah khususnya tenaga migran ilegal di Malaysia, sehingga dapat dirumuskan melalui rumusan masalah sebagai berikut: "Bagaimana upaya penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di Malaysia melalui Multitrack Diplomacy?"

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan mengenai diplomasi yang dilakukan oleh suatu negara serta peran LSM. Melalui penulisan ini, penulis berusaha untuk menganalisa mengenai upaya diplomasi yang dilakukan oleh suatu negara dan LSM terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang bermasalah di Malaysia, Indonesia dan LSM sebagai unit analisa penulisan ini dalam upaya untuk menangani Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia sebagai unit eksplanasi. Namun, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai Hubungan Internasional.

Hubungan internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi yang dilakukan oleh aktor- aktor yang melewati batas negara yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional. Interaksi global umumnya dilakukan oleh negara. Namun seiring dengan perkembangan zaman, interaksi global tidak hanya melibatkan aktor negara namun interaksi tersebut dapat dilakukan oleh NGO, INGO, Organisasi Internasional serta individu. Interaksi ini disebut dengan transnasional. Hubungan transnational merupakan pergerakan barang baik tangible atau intangible yang melintasi batas-batas negara (Keohane & Nye, 1971). Dalam interaksi internasional ini, tidak hanya peran pemerintah namun aktor non negara dapat secara signifikan mempengaruhi kepentingan dan perilaku negara- negara pada isu-isu internasional tertentu (Keohane & Nye, 1971). Hubungan transnasional berfokus pada interaksi antar aktor non negara dengan pemerintah didalam suatu negara.

Paradigma Liberalisme

Pandangan Liberalisme melihat sifat dasar manusia sebagai makhluk yang rasional (Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mohamad Yani, 2006). Interaksi antar negara didasari oleh kompetitif antar satu sama lain yang mengakibatkan konflik namun lebih sering bersifat kerjasama pada bidang ekonomi dan isu-isu lainnya (Bruce Ruset, 2004). Liberalisme melihat solusi penyelesaian suatu konflik adalah melalui kerjasama. Kaum liberalis berpandangan bila manusia dapat menggunakan rasionalitas maka suatu kerjasama antar negara yang menguntungkan dapat tercapai (Jackson dan Sorensen, 1999).

Konsep Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan pengambilan kebijakan yang sistematis oleh pemerintah yang berwenang secara konstitusional di dalam suatu negara (Rosenau, 1965). Kebijakan luar negeri kegiatan pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah antar satu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional (Ernest Petric, 2013). Sedangkan, kebijakan luar negeri adalah strategi suatu negara melalui suatu aktifitas yang serta untuk mendapatkan keuntungan dari lingkungan eksternalnya (James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson, 1976).

Teori Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan "power". Kepentingan nasional merupakan strategi yang digunakan oleh suatu negara dalam mendapatkan kekuasaan yang bertujuan untuk mengendalikan suatu negara terhadap negara lain. Upaya ini dapat dilakukan melalui kerjasama antar aktor-aktor (Anak Agung Banyu Perwita & Yayan Mochammad Yani, 2006). Kepentingan nasional adalah suatu kepentingan yang ingin dilindungi atau dicapai oleh suatu negara dalam hubungannya satu sama lain (Urmila Sharma & S.K. Sharma, 2007). Sedangkan menurut Frankel, kepentingan nasional merupakan nilai yang ingin ditegakkan oleh suatu negara serta bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan luar negeri negara-negara serta untuk menilai perilaku negara dalam lingkup internasional (Scott Burchill, 2005).

Konsep Diplomasi

Headley Bull diplomasi merupakan salah satu institusi utama masyarakat internasional dimana diplomasi memiliki peran utama yaitu untuk meminimalkan konflik serta menjaga ketertiban internasional dan mempertahankan konsensus internasional (Corneliu Bjola & Marcus Holmes, 2015). Dalam buku *Diplomacy: Theory and Practice* dijelaskan bahwa diplomasi adalah kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis yang memiliki tujuan utama adalah untuk menjaga kebijakan luar negerinya (G.R Berridge, 2015). Hal ini dapat dicapai melalui komunikasi antara aktor diplomatik dan pejabat lainnya yang dirancang untuk menciptakan kesepakatan. Pelaksanaan hubungan antarnegara ini dapat dilakukan melalui perwakilan resmi diplomatik melalui suatu perundingan dan permusyawaratan yang ditandai dengan suatu pertemuan atau konferensi (Mohm. Mu'in, 1982).

Multi-track Diplomacy

Multi track diplomacy merupakan proses diplomasi ini dilakukan oleh berbagai jaringan individu, komunitas serta institusi yang saling berhubungan satu sama lain untuk menciptakan sebuah dunia yang damai (Suyatno & Ismail Suardi Wekke, 2016). Awalnya, Joseph Montville terlebih dahulu menjelaskan multi-track diplomacy, dimana multi-track diplomacy terbagi menjadi diplomacy track one dan diplomacy track two. Diplomacy track one merupakan upaya pemerintah dalam menyelesaikan suatu konflik, sedangkan diplomacy track two merupakan upaya non governmental/Professional untuk menyelesaikan suatu konflik diantara negara bagian (Harvey J. Langholtz & Chris E. Stout,

2004). Tujuan dari multi-track diplomacy adalah untuk mengurangi dan menciptakan solusi dari suatu konflik/isu antar negara-negara, dengan mengurangi ketegangan serta meningkatkan komunikasi antar satu sama lain (Harvey J. Langholtz & Chris E. Stout, 2004).

Isi dari penelitian ini berusaha menjelaskan pertanyaan "bagaimana?" yang ditentukan dengan menggunakan penelitian bersifat deskriptif analitis. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy Moleong, 2004). Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menjelaskan penelitian melalui analisis permasalahan dengan variabel dependen sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan penelitian yang bersifat deskriptif.

Pembahasan

Globalisasi semakin berkembang pada abad 21 hal ini ditandai dengan perubahan adanya perkembangan dalam bidang ekonomi, teknologi dan informasi, sosial budaya serta politik, perkembangan tersebut menjadi pendorong peningkatan dan perubahan kebutuhan masyarakat didalam suatu negara. Kemajuan ekonomi dunia ini ditandai dengan globalisasi pasar seperti pasar tenaga kerja. Dalam istilah ekonomi, migrasi dapat dianggap sebagai tanda peningkatan kepentingan ekonomi, perkembangan regulasi ekonomi serta perkembangan sosial global (Denis Ushakov, 2014). Malaysia menjadi salah satu negara tujuan utama migrasi TKI, namun hal ini juga memicu munculnya TKI ilegal di Malaysia sebagai negara penerima.

Tenaga Kerja Indonesia ilegal merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki dokumen resmi selama berada di negara penerima. TKI ilegal dapat diibedakan menjadi 3 kelompok yaitu sebagai berikut, 1) mereka yang datang ke suatu negara secara sembunyi-sembunyi tanpa membawa dokumen-dokumen resmi, 2) Mereka yang menyalahi batas izin tinggal (overstay) yang ditandai dengan visa habis masa berlakunya, 3) mereka yang menyalahgunakan kontrak pekerjaan (Adharinalti, 2012). Terdapat faktor penarik dan pendorong migrasi tenaga kerja ke luar negeri, berikut ini merupakan faktor pendorong TKI ke Malaysia yaitu:

1. Penyebab migrasi internasional adalah karna adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar negara-negara (Denis Ushakov, 2014). Sebagian besar arus migrasi disebabkan oleh kebutuhan ekonomi, berdasarkan model migrasi menjelaskan bahwa upah tinggi telah ditunjukkan menjadi faktor penentu tenaga kerja untuk bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain (Denis Ushakov, 2014).
2. Negara pengirim umumnya melihat migrasi tenaga kerja terjadi karna tingginya tingkat pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia (Labour Migration from Indonesia, 2010).
3. Tingkat Kemiskinan, kemiskinan merupakan masalah setiap negara khususnya negara berkembang. Selain pengangguran, faktor lainnya seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya akses kegiatan ekonomi menjadi pemicu permasalahan kemiskinan didalam suatu negara.

Selain faktor pendorong, terdapat juga terdapat beberapa faktor penarik migrasi TKI ke Malaysia yaitu, mencakup peningkatan ekonomi, pendapatan yang tinggi,

memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan akses ke pasar tenaga kerja. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikategorikan faktor penarik TKI, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi, proses migrasi tenaga kerja melalui proses perekrutan tidak resmi atau ilegal dimana para tenaga kerja migran dapat dengan cepat mendapat pekerjaan tanpa mengeluarkan biaya yang besar serta dapat kebebasan untuk memilih jenis pekerjaan dan majikan yang diinginkan. Faktor lain arus migrasi tenaga kerja dari satu negara ke negara lain terjadi karna banyaknya permintaan di pasar tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja yang tinggi ini terjadi karna kurangnya tenaga kerja pada sektor domestik seperti sektor jasa dan layanan, pembantu rumah tangga, sektor pertanian dan industri.
2. Sosial dan Budaya, kedekatan geografis, kesamaan budaya, bahasa, serta biaya yang lebih murah menjadi faktor masyarakat untuk imigrasi ke suatu negara. Kedekatan geografis tersebut memungkinkan hubungan kerja yang baik antara pengusaha dan pekerja. Selain faktor pendorong dan penarik, terdapat juga faktor munculnya TKI ilegal di Malaysia yaitu sebagai berikut: (Labour Migration from Indonesia,2010).
3. Faktor kompleksitas proses pendaftaran. Proses pendaftaran tenaga kerja migran resmi membutuhkan waktu yang lama, proses yang rumit serta biaya yang besar.
4. Tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal, perdagangan manusia serta gaji yang tidak dibayar menjadi salah satu faktor tenaga kerja migran menjadi ilegal.
5. Kurangnya pengetahuan tenaga kerja migran mengenai proses dan peraturan migrasi serta hak dan kewajiban sebagai tenaga kerja di negara tujuan kerja.

Pada umumnya, masyarakat Indonesia melakukan migrasi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan. Berdasarkan data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 2015 tercatat sebanyak 97.621 TKI yang bekerja di Malaysia (Statistik Penduduk 2010- 2015). Malaysia menjadi negara tujuan utama para TKI karna memiliki kedekatan geografis, persamaan sejarah, kebudayaan sehingga hal ini memudahkan TKI untuk bersosialisasi dengan penduduk sekitar. Berikut merupakan jumlah penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri:

NO	NEGARA	2015	2016
		Januari - Mei	Januari - Mei
1	MALAYSIA	39.581	38.115
2	TAIWAN	31.894	31.889
3	SAUDI ARABIA	8.736	6.743
4	SINGAPORE	7.649	6.313
5	HONG KONG	6.966	6.033
6	BRUNEI DARUSSALAM	4.401	3.545
7	UNITED ARAB EMIRATES	2.511	1.236
8	OMAN	6.154	292
9	KOREA SELATAN	4.521	1.067
10	QATAR	1.487	443

Tabel 1: Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia Sumber 1 : www.bnp2tki.go.id 2015-2016

Namun dalam proses penempatan TKI di luar negeri, terdapat beberapa permasalahan. Tenaga kerja migran tersebut tidak memiliki dokumen resmi untuk izin masuk, tinggal serta bekerjadi negara tujuan. Tercatat pada bulan Januari hingga Maret 2015 terdapat sebanyak 1.142 TKI bermasalah yang dipulangkan ketanah air, arus pemulangan TKI bermasalah ini masih terjadi hingga tahun 2016 (BNP2TKI, 2015-2016). Tercatat pada bulan Januari hingga Juni tahun 2016, sebanyak 1.281 TKI bermasalah dipulangkan ke Indonesia. Sedikitnya, 1.121 orang dipulangkan karna dideportasi oleh pemerintahan Malaysia. Terdapat beberapa penyebab TKI bermasalah, yaitu sebagai berikut: (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 3, 2016).

1. TKI memasuki suatu negara melalui jalur ilegal seperti perbatasan darat dan perbatasan laut. TKI memilih jalur tidak resmi karna lebih mudah mendapatkan transportasi dengan biaya murah dan cepat. Selain itu, TKI pergi ke negara penerima secara mandiri ataupun melalui agent ilegal serta tanpa membawa dokumen-dokumen yang sah.
2. TKI memasuki suatu negara penerima menggunakan visa kunjungan dimana visa tersebut hanya berlaku selama 30 hari lebih dari 30 hari maka individu tersebut berstatus ilegal didalam suatu negara.
3. TKI ketika memasuki suatu negara memiliki dokumen-dokumen yang lengkap dan resmi sebagai syarat untuk bekerja di luar negeri, namun mendapatkan kondisi kerja yang memaksa TKI untuk pergi dari majikan seperti, terjadinya tindak kekerasan fisik dan verbal, eksploitasi, gaji yang tidak dibayar dll. Kejadian ini menyebabkan TKI kehilangan status legalnya karna telah dijelaskan didalam Nota Kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia dimana dokumen perjalanan para tenaga kerja migran disimpan oleh majikan.

Oleh sebab itu dibutuhkan peran negara serta LSM dalam menyelesaikan permasalahan TKI ilegal, dalam upaya untuk menyelesaikan suatu masalah tidak jarang kedua negara antara Indonesia menghadapi suatu ketegangan dengan berbagai macam konflik. Sehingga didalam hubungan kedua negara serumpun tersebut memiliki potensi untuk kerjasama serta konflik. Kebijakan luar negeri Presiden Jokowi dan Kementerian Luar Negeri memfokuskan pada 3 isu utama yaitu isu kedaulatan, kerjasama ekonomi serta perlindungan WNI di luar negeri (Berkas DPR, 2015). Pada tingkat bilateral, Indonesia memanfaatkan kedekatan geografisnya dengan wilayah Malaysia untuk menjalin hubungandiplomatik dalam berbagai bidang. Namun kerjasama kedua negara ini dihadapkan dengan berbagai hambatan seperti regulasi mengenai perlindungan WNI di luar negeri, penyeludupan dan perdagangan manusia (LJK Kementerian Luar Negeri, 2015).

Kepentingan Indonesia dan Malaysia untuk secara bersama-sama menjalin hubungan kerjasama diberbagai bidang, terdapat 3 prioritas isu yang akan diselesaikan melalui kerjasama ini yaitu, isu perlindungan TKI di Malaysia, isu perbatasan serta diplomasi ekonomi dan investasi (Berkas DPR, 2015). Namun, masih banyak terjadi masalah mengenai perilaku eksploitasi yang diterima TKI serta perdagangan manusia. Perlindungan TKI memang menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dan Malaysia. Indonesia akan terus bekerjasama dengan Malaysia dalam penanganan TKI ilegal serta membuat suatu kebijakan mengenai buruh migran di Malaysia. Berikut ini merupakan

upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia dan LSM terhadap Malaysia:

NO	Aktor Diplomasi	Isu	Upaya
1.	Pemerintah Indonesia	a) Perekrutan, pengiriman dan Penempatan b) Advokasi c) Penguatan pengiriman tenaga kerja melalui sarana legal dan prosudural	a. Perlindungan diberikan melalui perndampingan hukum dan kekonsuleran untuk warga negara yang terlibat masalah hukum di dalam suatu negara. b. Pembentukan SOP atau Guidance untuk penanganan perlindungan dan pelayanan bagi TKI/WNI c. Mendorong pelayanan dan perlindungan berbasisIT d. Mendorong program pemutihan dari pemerintah Malaysia
2.	LSM	1. Pemfasilitasan migrasi, 2. Pengaturan migrasi, 3. serta Pengawasan migrasi	a) Mendorong pemerintah Malaysia dalam memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak-hak migran Indonesia dengan standar hak asasi manusia; b) Meningkatkan informasi kepada masyarakat terkait prosedur migrasi yang aman c) Memberikan jasa layanan informasi sebelum tenaga kerja migran berangkat ke luar negeri d) pengawasan proses perekrutan tenaga kerja migran

Tabel 2: Upaya Diplomasi. Sumber: Diolah oleh penulis, dari berbagai sumber. 2017

Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya memiliki kebijakan nasional utama yaitu, untuk memberikan perlindungan kepada WNI yang berada di luar negeri. Dengan demikian, berdasarkan kebijakan nasional tersebut Indonesia memiliki prioritas utama untuk mengintensifkan diplomasinya terhadap negara lain melalui proses multi track diplomacy demi terciptanya kepentingan nasional bersama.

Multi track diplomacy yang dilakukan Indonesia dalam upaya untuk menyelesaikan

permasalahan TKI ilegal melibatkan beberapa aktor yaitu:

- 1) Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia adalah aktor utama dalam menjalankan diplomasi dan politik luar negeri. Indonesia bekerja sama dengan berbagai aktor dalam menciptakan kesepakatan kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan. Dalam kasus ini, Indonesia berkerjasama dengan Malaysia dalam menangani permasalahan TKI ilegal. Kerjasama ini dikhususkan pada proses penempatan dan perlindungan dengan melibatkan pemerintah Indonesia dan Malaysia.

Strategi diplomasi Indonesia terhadap Malaysia ditandai dengan dibuatnya kesepakatan kerjasama ketenagakerjaan, oleh sebab itu Presiden RI melakukan kunjungan ke Malaysia dalam upaya untuk melakukan diplomasi terkait peningkatan kerjasama di bidang ketenagakerjaan. Upaya ini memiliki hubungan yang erat dengan prioritas politik luar negeri Indonesia yaitu untuk memberikan perlindungan kepada WNI khususnya TKI di luar negeri. Selain untuk menjalin hubungan kerjasama, kunjungan Indonesia ke Malaysia adalah untuk mengontrol para tenaga kerja migran di Malaysia serta berupaya untuk mencari solusi terkait permasalahan yang melibatkan TKI khususnya terkait masalah TKI ilegal. Berbagai kerjasama terkait dengan bidang ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan penanganan masalah TKI ilegal dan perlindungan adalah sebagai berikut:

- Pada bulan Desember 2014, terjalin pertemuan bilateral antara Indonesia-Malaysia, kedua negara ini sepakat untuk berkerjasama yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah TKI ilegal melalui pemulangan/deportasi TKI ilegal ke Indonesia.
- Tahun 2015, Pemerintah Indonesia dan Malaysia berkerjasama untuk menyelesaikan masalah TKI ilegal dengan membuat kebijakan penempatan TKI harus dilakukan melalui jalur resmi. Harapan dari program ini adalah Indonesia dan Malaysia dapat saling berkerjasama dalam mengawasi arus tenaga kerja untuk meningkatkan aspek perlindungan (Kementerian ketenagakerjaan, 2015).
- Tahun 2015, Indonesia dan Malaysia melakukan upaya mengatasi masalah TKI ilegal melalui program re-hiring. Harapannya setelah melakukan proses re-hiring, TKI yang tidak memiliki dokumen dan unprosedural dapat mengurus dokumen –dokumen dan melakukan legalisasi perjanjian kerja di pemerintahan Malaysia (Kementerian Ketenagakerjaan, 2015)
- Pada bulan Mei tahun 2015 terjalin hubungan bilateral Indonesia-Malaysia dalam Joint Working Group (JWG) ke-10, dalam pertemuan ini membahas mengenai perlindungan bagi TKI melalui jalur One Channel Policy yaitu penempatan TKI melalui proses yang sesuai dengan MoU tujuannya untuk menghindari penempatan TKI ilegal (Kementerian ketenagakerjaan, 2015)
- Pada bulan Juli 2017, terkait dengan permasalahan TKI ilegal, Malaysia berkomitmen untuk merazia migran ilegal, serta majikan yang menggunakan tenaga kerja migran tersebut. Komitmen tersebut diwujudkan dalam program E-Card (Enforcement Card) program kartu untuk perubahan status dari ilegal menjadi legal.
- Pada bulan Juni 2017, terkait dengan menangani TKI ilegal. Indonesia

dan Malaysia melakukan pertemuan informal untuk memperpanjang program rehiring dan penghentian program razia. Program rehiring merupakan kelanjutan dari program E-Card.

- Pada bulan Agustus tahun 2017 terjalin hubungan bilateral Indonesia-Malaysia dalam pertemuan tingkat Menteri luar negeri ke-15 Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) di Jakarta. Terdapat beberapa isu yang dibahas diantaranya mengenai kerjasama dibidang ketenagakerjaan.

2) Peran International Organization for Migration (IOM) merupakan organisasi antar-pemerintah yang fokus terhadap isu migrasi. Organisasi IOM berdiri sejak tahun 1951. IOM memiliki tujuan untuk mempromosikan migrasi yang tertib, aman yaitu dengan memberikan layanan jasa kepada negara serta masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan migrasi ke luar negeri (Fitri Andayani, 2013). IOM berupaya membantu instansi pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan TKI ilegal di Malaysia. Terdapat 3 strategi IOM dalam upaya pencegahan TKI ilegal yaitu, 1) meningkatkan kesadaran publik tentang proses migrasi yang resmi dan aman melalui kampanye informasi; (2) memberikan jasa layanan informasi bagi calon buruh migran yang hendak berangkat dan (3) pemantauan proses perekrutan buruh migran. Oleh sebab itu IOM berupaya untuk membantu Indonesia dalam penanganan migrasi ilegal di Malaysia. Adapun beberapa kegiatan IOM dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran publik, memberikan informasi serta melakukan pengawasan yaitu sebagai berikut:

- Program safe project pada tahun 2014, Program ini didanai oleh Uni Eropa yang telah bekerja sama dengan IOM dan BNP2TKI bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. IOM membuat projek "Strengthening Labour Migration Management Capacities in Bangladesh, Indonesia, Nepal and the Philippines for Replication in Other Colombo Process Member States Project" tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas pengelolaan migrasi tenaga kerja di Bangladesh, Indonesia, Nepal dan Filipina.
- Pada tahun 2015 IOM Memberikan jasa layanan informasi Pra-keberangkatan, IOM bersama dengan BNP2TKI melakukan revisi material pelatihan pra-keberangkatan BNP2TKI, pelatihan dari BNP2TKI di 19 provinsi dan pengembangan buku yang berisi tentang informasi negara tujuan (IOM, 2015).
- Pada tahun 2015 IOM mengawasi rekrutmen Tenaga Kerja Indonesia, IOM bersama dengan KEMENAKER DAN BNP2TKI berusaha untuk meningkatkan pengawasan dalam proses perekrutan TKI dari perusahaan perekrutan serta melakukan evaluasi sistem yang diterapkan, memberikan rekomendasi, mengembangkan pelatihan.
- Pada tahun 2015, Kementerian ketenagakerjaan mendukung program kampanye Lembaga Migrasi Internasional atau International Organization for Migration (IOM). Kampanye tersebut berupaya untuk mendukung migrasi yang aman dan pemberantasan perdagangan manusia (trafficking).

Berdasarkan data-data yang telah penulis dapatkan, penulis menganalisis bahwa Indonesia dan Malaysia menjalin kerjasama untuk mencapai kepentingan nasional kedua negara terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Namun tidak hanya peran negara, namun terdapat juga peran aktor non negara seperti IOM juga memiliki peran penting dalam isu-isu internasional dan dapat mempengaruhi suatu perilaku serta kepentingan suatu negara.

Pemerintah dapat berhubungan langsung baik dengan organisasi pemerintah, non pemerintah dan pemerintah dapat berhubungan langsung dengan masyarakat melalui pemerintah pusat. pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia melakukan diplomasi G to G dalam menjalankan prioritas politik luar negerinya dalam menangani permasalahan TKI ilegal dan perlindungan kepada TKI. Selain kerjasama antar pemerintah, Pemerintah kedua negara juga dapat berinteraksi dengan organisasi pemerintah maupun non pemerintah, guna untuk membantu pemerintah dalam merealisasikan prioritas politik luar negerinya. Berbagai aktifitas baik diplomasi one-track maupun multi track semuanya tetap mengacu pada prinsip politik luar negeri RI yang bebas dan aktif. Hasil analisis penelitian ini adalah, berdasarkan teori dan konsep yang ada. Penulis menganalisis bahwa peran Pemerintah Indonesia dan LSM (IOM) telah dikatakan mengalami perkembangan.

Namun karna adanya hambatan-hambatan sehingga Pemerintah Indonesia, Malaysia dan LSM (IOM) bersama-sama untuk memberikan perlindungan terhadap TKI ilegal. Dalam mewujudkan perlindungan dan pencegahan TKI ilegal, Indonesia melakukan upaya multi-track diplomacy melalui first track diplomacy yaitu melalui pemerintah dimana Indonesia dan Malaysia melakukan pertemuan bilateral secara intensif dari tahun 2014 hingga 2017 dengan memfokuskan pada perlindungan melalui pendampingan hukum, pembentukan Guidance untuk pelayanan TKI, mendorong pelayanan dan perlindungan berbasis IT serta mendorong program pemutihan dari pemerintah Malaysia. Sedangkan second track diplomacy dilakukan oleh (IOM) yang bekerjasama dengan BNP2TKI dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menangani dampak dari TKI ilegal yaitu human trafficking.

Kesimpulan

Perkembangan kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam upaya penempatan dan perlindungan dipengaruhi oleh politik luar negeri serta kepentingan nasional mengenai bidang ketenagakerjaan masing-masing negara. Kebijakan kerjasama terkait penempatan TKI telah dibentuk dalam MoU penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia baik untuk sektor formal maupun sektor non formal.

Langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia-Malaysia dalam menyelesaikan kasus permasalahan TKI ilegal adalah dengan memberikan jaminan hukum kepada TKI ilegal yang memiliki masalah hukum dengan pemerintah Malaysia, membentuk kerjasama dengan organisasi IOM untuk menyelesaikan masalah TKI ilegal. Dengan upaya pemberian pendampingan advokasi, proses perekrutan, pengiriman serta penempatan yang baik, upaya sosialisasi serta kampanye mengenai migrasi yang aman di berbagai wilayah hingga proses pemulangan dan deportasi TKI ilegal. Pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi tenaga kerja migran sebelum berangkat ke luar negeri. Selain itu, kedua pihak baik Indonesia maupun Malaysia berupaya untuk mengkaji ulang kesepakatan kebijakan antara kedua negara mengenai proses perlindungan TKI di luar negeri agar dapat mengurangi jumlah TKI ilegal yang berada di Malaysia.

Referensi

- Berridge, G.R, *Diplomacy Theory and Practice*, Basingstoke & New York, 2015), hal 1.
- Bjola, Corneliu and Holmes Marcus, *Digital Diplomacy*, Abingdon, 2015, hal 2.
- Burchill Scott, *The National Interest in International Relations Theory*, Palgrave Macmillan, New York, 2005, hal 3.
- David Kustella, Bruce Ruset and Harvey Star. 2004. *World Politics: The Menu for Choice*. 7th Edition. Belmont: Wadworth, hal 28.
- G, Sorensen and Robert, 1999. *Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press Inc. hal 3.
- James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal 27.
- Mu'in, Mohm, *Perjuangan Diplomas dan Politik Luar*, Pustaka Azam, 1982:13
- Moleong, Lexy, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal.21
- Nye, J.S. Nye and R.O. Keohane, *Transnational Relations and World Politics*, Harvard University Press, 1971, hal 25.
- Petric, Ernest, *Foreign Policy: From Conception to Diplomatic Practice*, Danvers, 2013, hal 1. Sharma, S.K. and Urmila Sharma, "Principles and Theory of Political Science", New Delhi, 2007, hal 26.
- Suyatno, and Ismail Suardi Wekke, *governance in southeast asia: Indonesia-Malaysia Perspective on Politics and Social Studies*, (Deepublish, 2016, Yogyakarta), hal 80.
- Stout, Chris E. and Harvey J. Langholtz, *The Psychology of Diplomacy*, Praeger Publisher, 2004, Connecticut, hal 106.
- Ushakov, Denis, *Urbanization and Migration as Factors Affecting Global Economic Development*, IGI Global, 2014, hal. 15.
- Yani, Yayan Mochammad dan Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochammad Yani, "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional", (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal 35.
- Andayani, Fitri, *Peran International Organization For Migration (IOM) dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Tahun 2013-2015*, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau, hal 3.
- BNP2TKI, "Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016", Hal 8.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3, 2016.
- Sali Susiana, *Rencana Penghentian Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Sektor Informal*, Vol. VII, No. 05/P3DI/Maret 2015.
- Labour Migration from Indonesia, https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/published_docs/Final-LM-Report-Bahasa-Indonesia.pdf. hal 10.
- LJK, Kemenlu, 2015 [https://www.kemlu.go.id/AKIP/LKJ%20Kemenlu%202015%20\(Buku%20II%20Full%20Version\).pdf](https://www.kemlu.go.id/AKIP/LKJ%20Kemenlu%202015%20(Buku%20II%20Full%20Version).pdf), Diakses pada tanggal 5 Desember 2017.
- Indonesia dan Malaysia siapkan Program re-hiring untuk Atasi TKI ilegal, <http://kemnaker.go.id/berita/berita-tki/indonesia-malaysia-siapkan-program-re-hiring-untuk-atasi-tki-ilegal>, Diakses pada tanggal 10 desember 2017.